



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-7
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII : PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 merupakan Penjabaran dari Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan 5 (lima) tahunan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan sebagai tolak ukur pertanggung jawaban APBD berdasarkan penilaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam satu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang maka di bentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 tahun 2022 yaitu sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Adanya perubahan Renstra dikarenakan ada perubahan PERDA No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019 – 2024 .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019–2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah:

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas, dan berkelanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sampang dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang.
- b. Memberikan pedoman dan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima Tahun.
- c. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas, menumbuh kembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif dilingkungan masyarakat dan dunia usaha.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum

	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sampang dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang menyelenggarakan Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang sebagai berikut:

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

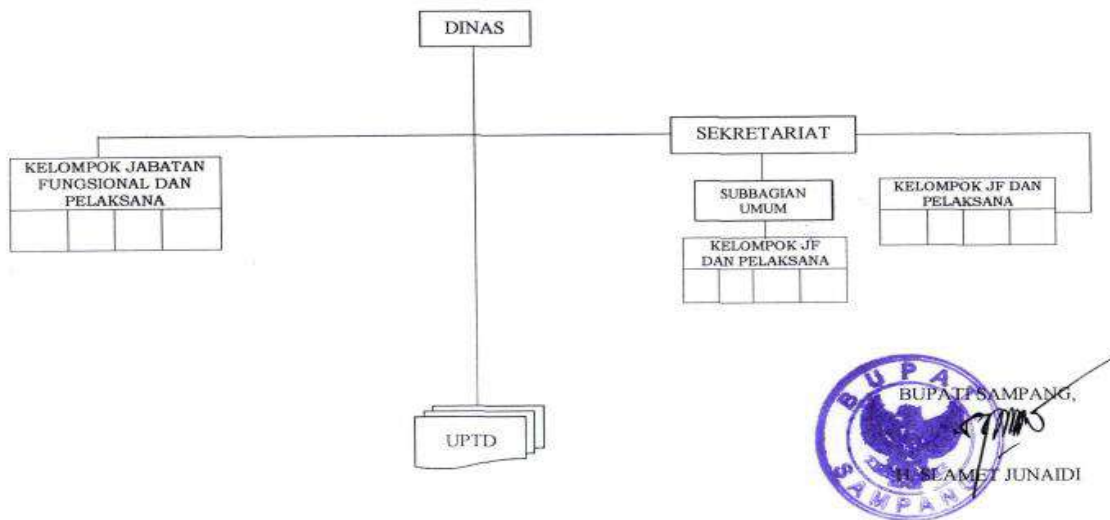
daerah Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang pada Gambar 2.1 berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Kabupaten Sampang
(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 123 TAHUN 2022)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMPANG



- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

1.2. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- c. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

1.3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- e. **Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:**

1. Pejabat fungsional jenjang pertama yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
2. Pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
3. Pejabat fungsional jenjang pertama, muda, madya dan utama yang tidak ditempatkan di Sekretariat berada dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas;
4. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Sub Bagian dengan penugasan yang diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas;
5. Pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara perorangan dan/atau kelompok.
6. Pelaksanaan tugas secara kelompok sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan melalui pembentukan Tim, Satuan Tugas dan/atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
7. Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

1.4. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi harus:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan

- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
2. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.5. PENGISIAN JABATAN

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
4. Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
5. Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
6. Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
7. Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
8. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Berikut ini adalah

jumlah Personalia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Data Adminstrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Menurut Jenis Kelamin

Uraian	Satuan	Jumlah
a. Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	Orang	12
2. Perempuan	Orang	11
Jumlah	Orang	23

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2023

Analisis Gender di Dpmptsp Kabupaten Sampang didominasi oleh laki laki sebanyak 12 orang atau 51,00 % dan Perempuan sebanyak 11 orang atau 49,00 % .

Tabel 2.2

Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Menurut Golongan dan Jabatan

Uraian	Satuan	Jumlah
JUMLAH PNS		23
1. Golongan I	Orang	0
2. Golongan II	Orang	2
3. Golongan III	Orang	15
4. Golongan IV	Orang	6
JUMLAH PNS	Orang	23
a. Pejabat Struktural		
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	1
3. Eselon IV	Orang	1
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	Orang	3
b. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	19
c. Jumlah Staf PNS	Orang	12
JUMLAH	Orang	23

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2023

Tabel 2.3

Data Administrasi Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	0
2	Lulusan SLTP	Orang	0
3	Lulusan SLTA	Orang	2
4	Lulusan D.I	Orang	0

5	Lulusan D.II	Orang	0
6	Lulusan D.III	Orang	0
7	Lulusan D.IV	Orang	0
8	Lulusan S-1	Orang	9
9	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	11
10	Lainnya	Orang	0
Jumlah		Orang	23

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2023

Di samping sumber daya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di DPMPTSP Kabupaten Sampang sampai saat ini belum cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Prasarana di DPMPTSP Kabupaten Sampang
(Posisi 30 Desember 2022)

No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Sepeda motor	7	-	-	7
2	Station Wagon	1	-	-	1
3	Pompa Air	2	-	-	2
4	Teralis	1	-	-	1
5	Mesin Ketik	-	-	-	-
6	Mesin Ketik Elektronik	-	-	1	1
7	Mesin Printer	9	-	-	9
8	Filling Kabinet	4	-	-	4
9	Brankas	3	-	-	3
10	Lemari kayu	2	-	-	2
11	Alat penghancur kertas	-	-	1	1
12	Papan informasi	3	-	-	3
13	Papan info/papan baca	1	-	-	1
14	Papan nama instansi	1	-	-	1
15	Gorden	2	-	1	3
16	Almari	1	-	1	2
17	Meja kerja	35	-	-	35
18	Meja rapat	4	-	-	4
19	Sofa tamu	2	-	-	2
20	Kursi kerja	66	65	1	66
21	Kursi rapat	15	-	-	15

22	Karpet	1	-	-	1
23	Penunjuk waktu	-	-	-	-
24	Kulkas	1	-	-	1
25	A.C.	11	-	5	16
26	A.C. Unit	12	-	7	19
27	Televisi	3	-	2	5
28	Kamera digital	4	-	2	6
29	Ukiran	1	-	-	1
30	Lukisan/foto	1	-	-	1
31	Dispenser	1	-	1	2
32	Kamera/ cctv	10	-	-	10
33	Umbul-umbul	-	-	-	-
34	NoteBook	5	-	-	5
35	Software	1	-	-	1
36	Website dan Server	3	-	-	3
37	Scanner	8	-	2	10
38	Jaringan computer	1	-	-	1
39	Proyektor	2	-	-	2
40	Monitor	1	-	3	4
41	Mesin jilid	2	-	-	2
42	Telepon	-	-	1	1
43	Microphone	1	-	-	1
44	Loudspeker	1	-	-	1
45	Mesin Faximile	-	-	1	1
46	Bangunan gedung kantor permanen	1	-	-	1
48	Instalasi listrik	1	-	-	1
49	Instalasi PLTD kapasitas sedang	1	-	-	1
50	Ekonomi	1	-	-	1
51	Hukum	1	-	-	1
47	Gedung kantor	1	-	-	1

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Dpmpstsp Kabupaten Sampang, 2023

Tabel T-C .23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang
Tahun 2019 - 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi				13,85 %	9,96 %	0,08 %	0,16 %	0,24 %	0,32 %	9,7%	-26,69 %	0,13%	10,71 %	0,24 %	0,32 %	70,03 %	-267,9 %	162,5%	6693,75 %	100%	100%
1.a	Nilai Realisasi Investasi				438.667,875	464.667,875	299.943,870	303.257,158	306.687,937	310.223,389	422.583,748	297.115,146	297.513,257	329.378.337,166	306.687,937	310.223,389	96,33 %	63,94 %	99,19%	108,61%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81,05	81,55	81,95	82,47	82,99	83,51	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	100,3 %	99,85 %	99,82%	100%	100%	100%
2.a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,13	93,16	93,26	93,24	93,50	93,75	100,03 %	100,01 %	100,01%	99,88%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD \leq 100%” atau tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 100,95 %, capaian Indikator sasaran RPJMD sebanyak 3 indikator dari 3 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dpmptsp Naker Tahun 2019-2024 adalah 100 atau sangat baik.

Tabel T-C. 24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Sampang**

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)	(22)
Urusan Penanaman Modal																						
2.12.01.15	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	269.163.000	140.049.086	-	-	-	-	248.539.200	136.411.280	-	-	-	-	92,33	97,40	-	-	-	-	339.187.543	316.744.840
2.12.01.16	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	418.325.350	133.160.510	-	-	-	-	366.913.563	129.881.009	-	-	-	-	87,71	97,53	-	-	-	-	484.905.605	431.854.068
2.12.01.17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan Tepat Waktu	370.207.900	178.370.680	-	-	-	-	233.634.780	168.447.350	-	-	-	-	63,10	94,43	-	-	-	-	459.393.240	317.858.455
2.12.01.18	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti	97.935.800	38.745.022	-	-	-	-	82.140.751	32.566.400	-	-	-	-	83,87	84,06	-	-	-	-	117.308.311	98.423.951
2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	410.455.000	330.469.995	-	-	-	-	366.395.418	310.436.868	-	-	-	-	89,26	93,93	-	-	-	-	575.689.998	521.613.852
2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	1.104.950.650	321.772.295	-	-	-	-	1.104.180.025	315.739.490	-	-	-	-	99,93	98,13	-	-	-	-	1.265.836.798	1.262.049.770
2.12.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	32.000.000	2.000.000	-	-	-	-	31.408.624	1.900.000	-	-	-	-	98,15	95,00	-	-	-	-	33.000.000	32.358.624

2.12.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelaporan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat waktu	48.155.000	31.534.709	-	-	-	-	48.076.590	19.008.000	-	-	-	-	99,84	60,28	-	-	-	-	63.922.355	57.580.590
KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)	(22)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																						
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Potensi Investasi	-	-	13.849.852	81.652.790	112.103.802	211.785.799	-	-	13.849.852	78.032.681	112.103.802	211.785.799	-	-	100	95,57	100	100	372.744.732	386.594.584
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	-	-	13.450.251	137.589.771	250.165.519	158.460.729	-	-	13.450.251	132.175.000	250.165.519	158.460.729	-	-	100	96,06	100	100	353.713.398	367.163.649
2.18.05	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	-	-	438.270.940	412.659.910	354.700.000	533.584.621	-	-	438.270.940	333.881.000	354.700.000	533.584.621	-	-	100	80,91	100	100	818.596.698	1.256.867.638
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	-	-	13.450.251	133.872.580	85.858.199	158.460.729	-	-	13.450.251	132.391.944	85.858.199	158.460.729	-	-	100	98,89	100	100	478.667.404	556.619.813
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	-	-	113.082.729	205.694.457	213.474.700	213.291.653	-	-	113.082.729	189.629.410	213.474.700	213.291.653	-	-	100	92,19	100	100	476.106.074	589.188.803
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	-	-	5.047.587.496	4.757.167.676	4.309.279.057	5.691.727.026	-	-	5.047.587.496	4.399.548.918	4.309.279.057	5.691.727.026	-	-	100	92,48	100	100	12.704.978.217	17.752.565.713

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2019 - 2024 sebesar 100 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 100 persen. Hal ini disebabkan oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kabupaten Sampang yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran program/kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2019 - 2024. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 100 persen dan realisasinya sebesar 100 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Program **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** target sebesar 100 persen dan realisasinya sebesar 92,48 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut ada pada Tahun 2019 dan 2020 sehingga nilai rata-rata pertumbuhannya cukup signifikan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada Belanja Langsung terdapat pada **Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar **80,91** persen. Hal ini dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Dinas dan dianggarkan sesuai dengan kebijakan Tim Anggaran Pendapatan Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dpmptsp Naker Kabupaten Sampang
sampai dengan Tahun 2021 terhadap Sasaran Renstra
Dpmptsp Provinsi dan Renstra BKPM RI

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dpmptsp Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra BKPM RI
1	2	3	4	5
1.	Nilai Realisasi Investasi		1. Pengumpulan Data Investasi Tepat Waktu	1. Banyaknya Investor untuk meningkatkan laju pertumbuhan nilai investasi
a.	Jumlah Peluang Investasi	100%		
b.	Jumlah investor (PMDN/PMA)	100%		
c.	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	85%	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penunjang Investasi	
d.	Nilai Investasi PMDN	76%		
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103%		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Dpmptsp Kabupaten Sampang dengan Dpmptsp Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Dpmptsp Provinsi Jawa Timur.

2.4.1 Hasil Telaahan terhadap RTRW

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi atau penempatan fasilitas tertentu, **melainkan** diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah masing – masing.

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan. Tetapi pelayanan yang dilaksanakan Oleh Dpmpstsp Kabupaten Sampang tidak terkait dengan lokasi/ penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang sehingga tidak memerlukan Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/ pelayanan / wilayah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang. Perbup tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan Penanaman Modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan Tugas dan Fungsi **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)** serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kabupaten Sampang teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah/ tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas dan kualitas	Pelayanan yang diberikan kurang maksimal	Pengajuan tambahan karyawan/PNS
2	Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan perijinan	Sarana dan Prasarana yang terbatas	Pengajuan Sarana dan Prasarana
3	Kurangnya konsistensi UMKM di dalam menjalankan usahanya	Kesulitan UMKM didalam memasarkan produknya	Koordinasi dengan UMKM dan dinas terkait terkait pemasaran usaha

Sumber : Dpmpitp Kabupaten Sampang, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ditentukan visi dan misi Kabupaten Sampang sebagai berikut :

“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
- Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi DPMPTSP mendukung pada pencapaian misi 2 dan Misi 4 yaitu *“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif”* dan *“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”*. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Sampang terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan pelayanan yang berkualitas</p>	<p>1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal</p> <p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna</p>	<p>1. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi</p> <p>2. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dn koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis terkait sectoral dalam nota kesepahaman</p> <p>4. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan</p> <p>5. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>6. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas</p>	<p>1. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <p>2. Adanya anggaran khusus untuk Tim Teknis dalam melaksanakan proses peninjauan lapangan</p> <p>3. Adanya aplikasi perizinan baru yakni OSS (Online Single Submisiion) yang sedang dikembangkan</p> <p>4. Dukungan OPD teknis terkait</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang akan mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Sampang Berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<p>Sasaran Jangka Menengah Renstra Dpmpstsp Provinsi Jawa Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> SDM Perencana yang berkualitas dan profesional Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Sistem yang tersedia belum di manfaatkan secara maksimal Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Penanaman Modal Keterbatasan SDM pada Dpmpstsp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmpstsp secara ideal Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien Perkembangan teknologi dan informasi
		<p>Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui 	<ol style="list-style-type: none"> Masih terlambatnya penyampaian LKPM 	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapatnya wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif

		kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
		2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	1. Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	1. Belum terdapat perhitungan prospektus secara riil di kabupaten sampang	1. Tersedianya peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sampang
		3.. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	1. Belum tersedianya Rencana umum penanaman modal (RUPM) di Kabupaten Sampang		1. Tersedianya peta potensi investasi

Sumber : Dpmpmsp Kabupaten Sampang, 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi / penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup, Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi / pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
2	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar
3		Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kabupaten Sampang		Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang
	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal
4.				Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi Faktor internal yaitu :

Kekuatan (*strength*) :

- a. Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sampang

- b. Meningkatkan Para Pencari Kerja untuk Memperoleh pekerjaan dengan adanya Job Fair
- c. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana
- e. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- f. Peta potensi investasi
- g. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP

Kelemahan (Weakness) :

- a. Kurangnya Pengetahuan Pencari Kerja
- b. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait Sektor Logistik
- c. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- d. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (Opportunities)

- a. Penerapan Pelatihan kerja di BLK
- b. Penerapan Informasi Lowongan Pekerjaan melalui Media Sosial
- c. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Pengembangan industry kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Ancaman (Threats)

- a. Akses Sosial media yang kurang dipahami oleh Masyarakat untuk memperoleh Pekerjaan yang sudah di Upload oleh website BLK.sampang
- b. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik
- c. Adanya pengaduan masalah perijinan
- d. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- e. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan

Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
5. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Sampang mendukung pada 2 misi yakni : **misi 2** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif ”** dan **misi 4** mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai DPMPTSP dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Tujuan:											
	Meningkatkan Investasi Daerah	1	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	9,7	-29,69	0,13	10,71	0,24	0,32	0,32
	Sasaran:											
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	385.297,435	422.583,748	297.115,146	297.513,257	329.378.337.166	306.687,934	310.223,389	310.223,389
2.	Tujuan:											
	Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
	Sasaran:											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,01	93,13	93,16	93,26	93,35	93,24	93,75	93,75

Sumber : Dpmpstp Kabupaten Sampang, 2023

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari Indikator sasaran strategis dimana IKU yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Invesasi
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	<i>Nilai realisasi investasi</i>	<i>Jumlah Nilai Investor yang mendaftar di Tahun tersebut yang realisasi mempunyai Investasi berskala Nasional (dalam rupiah)</i>	<i>Laporan data realisasi investasi</i>	<i>Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, dan Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal</i>
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur } x}{\text{Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi}}$	<i>Hasil Survey, Laporan data dan Dokumen SKM</i>	<i>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan pelaporan Layanan</i>

Sumber : Dpmpstsp Kabupaten Sampang, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dpmpptsp haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dpmpptsp Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif**” dan **misi 4** yang mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**”

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan Melalui Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
T.2	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pemeratan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan Agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif		DPMPTSP NAKER
		IT.4	Indeks Gini			
		IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis			
S.8	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	IS. 9	Tingkat Pengangguran Terbuka		Mengurangi Pengangguran dengan membuka Pelatihan Kerja di BLK	
S.11	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif	IS.13	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi		Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis IT melalui OSS	
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPTSP NAKER, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dpmpstp Naker secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<u>Peluang /Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM Bidang Tenaga Kerja, Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
<u>Ancaman /Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi di bidang pelayanan perijinan

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada Bab sebelumnya maka strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan berinvestasi dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor • Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi • Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan sistem kerjasama investasi • Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi • Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinani	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal • Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya • Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan perizinan • Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi sebagai alat perencana, pelayanan pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi • Merumuskan sistem promosi investasi baik dalam skala nasional, regional maupun internasional • Merumuskan mekanisme pelaksanaan sistem layanan perizinan bagi investor • Merumuskan sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perizinan

Beberapa inovasi DPMPTSP Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang antara lain:

INOVASI DAERAH	DESKRIPSI / KETERANGAN	KOORDINATOR
FTAMIN BAROKAH (Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi pembangunan perekonomian daerah, walaupun Usaha Kecil dan Menengah masih memiliki persoalan-persoalan yang kompleks. Untuk memajukan ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM perlu adanya dukungan dari semua pihak, Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker membuka program fasilitasi kemitraan Usaha Besar dengan UMKM untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar sehingga membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah	DPMPTSP BIDANG PENANAMAN MODAL
FAIS LAGI ONLINE (Fasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online)	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian atas pelaku usaha di Kabupaten Sampang dalam bentuk pemberian fasilitasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang setiap tahun dilaksanakan. Setelah melakukan kegiatan tersebut terdapat kendala atau permasalahan di lapangan yang salah satunya pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban melakukan pelaporan yang setiap tiga bulan sekali harus dilaporkan. Berawal dari permasalahan tersebut DPMPTSP melakukan perubahan system kinerja dengan pembentukan tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal dengan cara melakukan pendampingan pengisian LKPM Online.	DPMPTSP BIDANG PENANAMAN MODAL
BARING SIANG (Business Gathering Investasi Kabupaten Sampang)	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu salah satu tugas pokok dan fungsinya yakni melakukan promosi penanaman modal, dalam hal ini terkait promosi potensi dan peluang investasi di kabupaten Sampang. Kegiatan promosi terhadap potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Sampang dalam rangka meningkatkan masuknya investasi, menjadi salah satu concern kebijakan pembangunan di Kabupaten Sampang. Upaya tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan promosi dan pemanfaatan media informasi. Business gathering merupakan suatu wadah dan media untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi kabupaten sampan, dan untuk menarik minat para pelaku usaha, baik pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha UMKM.	DPMPTSP BIDANG PENANAMAN MODAL

<p>TANPA POINT (Pembuatan Peta Potensi Investasi)</p>	<p>Posisi Strategis Kabupaten Sampang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Didukung oleh situasi daerah yang relative lebih aman serta adanya kemauan keras Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjadikan Kabupaten Sampang sebagai salah satu wilayah yang potensial dan menarik untuk berinvestasi. Untuk menarik perhatian investor menanamkan modalnya di Kabupaten Sampang, salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan data yang tepat dan akurat mengenai sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sampang. Dengan tersedianya data-data yang terkait dengan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Sampang maka akan mempermudah investor untuk melihat secara utuh potensi apa saja yang terkandung dan memiliki nilai jual di dalam Kabupaten Sampang untuk kemudian dikelola.</p>	<p>DPMPTSP BIDANG PENANAMAN MODAL</p>
<p>KONEKSI (Konseling dan Klinik Investasi)</p>	<p>Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian atas pelaku usaha di Kabupaten Sampang dalam bentuk pemeberian fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha, dengan ini DPMPTSP memberikan inovasi terkait konseling dan penyelesaian permasalahan baik perijinan dan non perijinan.</p>	<p>DPMPTSP BIDANG PENANAMAN MODAL</p>
<p>LANJUT MAS BROO.....!!!</p>	<p>Lanjut Mas Broo adalah pelayanan lanjutan dari layanan Online Single Submission (OSS) ke tiga belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Perbedaanya yaitu jika moling-ling OSS pelayanan ditujukan kepada pelaku usaha yang kondisi fisiknya normal, sedangkan Lanjut Mas Broo yaitu pelayanan perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sampang. Pemberian layanan perizinan IUMK antar jemput melalui OSS bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang, di koordinir oleh paguyuban/atau organisasinya yang diketahui oleh Bapak Munawi dari Krampon/Torjun, sedangkan Sekretarisnya dijabat oleh Ibu Nur Illyati. System kerja inovasi ini yaitu DPMPTSP Kab. Sampang mendapat informasi dari Ibu Nur Illyati terkait penyandang disabilitas yang mau ngurus perizinan OSS, setelah info diterima tim inovasi langsung mendatangi tempat/rumah penyandang disabilitas di lokasi untuk memberikan layanan perizinan tersebut secara langsung di</p>	<p>DPMPTSP BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>

	rumahnya (print out/langsung jadi).	
YA TORE NGOLADHI MPP KAB. SAMPANG	Judul inovasi mengambil Bahasa madura yang dapat di artikan yaitu mari Bersama-sama berkunjung / melihat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sampang yang terletak di depan Alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang. Maksud inovasi ini adalah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat sampan, agar lebih mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel. Begitu banyak permasalahan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah, maka sangat perlu dilakukan perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan prima. Inilah kerangka mendasar yang harus diramu dalam tata cara yang berorientasi kepada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat sehingga lahir generasi Pelayanan Publik Terpadu, lalu generasi kedua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), MPP adalah generasi ke tiga yang lebih progresif memadukan pelayanan pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. DPMPTSP Kab. Sampang ingin mewujudkan pelayanan tersebut dengan cara memperbaiki birokrasi perizinan dan non perizinan agar lebih mudah, cepat, transparat, dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati Sampang “Hebat Bermartabat yaitu program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan public melalui MPP yang diturunkan dalam program pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu melalui kegiatan peningkatan kinerja pada MPP”.	DPMPTSP BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
SI-POS (Sistem Informasi Perizinan Online Sampang)	Inovasi ini adalah berupa aplikasi periznan dan non perizinan yang sudah terintegrasikan dan dikembangkan oleh dinas. Inovasi ini memberikan kemudahan kepada pemohon izin untuk melakukan pemrosesan perizinan secara online dimana saja tidak perlu datang ke Kantor DPMPTSP Kab. Sampang. Namun demikian kami tidak saklek dalam penerapan inovasi ini, jika pemohon izin tidak membuka aplikasi tersebut kami siap memberikan pendampingan secara gratis bagi pemohon tersebut setiap jam kerja, dalam proses penerapan SI-POS tersebut terdapat empat verifikator yaitu : A. Tim Teknis (OPD terkait); B. Sub Koordinator Non OSS; C. Koordinator PTSP; D. Kepala DPMPTSP Aplikasi SI-POS ini bisa diakses melalui link http://si-pos.sampangkab.go.id/ dan melalui PC/Laptop ataupun smartphone.	DPMPTSP BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

<p>LAKI PASTA (Layanan Keliling Pasar Tradisional)</p>	<p>Inovasi ini adalah pengembangan dari layanan perizinan OSS moling-ling dan Lanjut Mas Broo, cumin perbedaannya pada lokasi yang kita layani. Perbedaan tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moling-ling → Pelayanan Perizinan OSS ke tiga belas kecamatan; - Lanjut Mas Broo → Pelayanan Perizinan OSS ke penyandang disabilitas Kabupaten Sampang; - Laki Pasta → Pelayanan Perizinan OSS ke pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sampang. <p>Jadi intinya inovasi layanan yang kami berikan tidak monoton dan bisa dirasakan oleh semua pelaku usaha yang ada di pasar tradisional, kami menyadari pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sampang tidak punya waktu untuk mengurus perizinannya, maka dari itu DPMPTSP Kab. Sampang mempunyai inovasi yang sekiranya bisa diterima oleh pelaku usaha/pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional tersebut.</p>	<p>DPMPTSP BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>
<p>LAPINDES (Layanan Perizinan ke Desa-Desa)</p>	<p>Inovasi ini adalah juga lanjutan atau pengembangan pada point ke - 4 diatas, cuman system kerjanya kita bekerja sama dengan Kepala Desa yang ada di kabupaten Sampang untuk mencarikan pelaku usaha yang belum mempunyai izin sejumlah 12 orang dan dikumpulkan di Pendopo Desanya masing-masing. Setelah itu tim inovasi DPMPTSP Pelayanan Perizinan OSS mendatangi Pendopo tersebut secara bergiliran sesuai jadwal yang sudah kami tentukan.</p>	<p>DPMPTSP BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang memiliki program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan di mana kegiatan dan Sub Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Oleh karena itu, rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Penjabaran program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2.019		2.020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kine rja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
1. Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,80	9,7	-	-26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,69	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
	1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi	Juta Rupiah	385.297,435	422.583,748	-	297.115,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.115,146	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01	URUSAN PENANAMAN MODAL																			
		2.12.2.12.01.15	Program Penanaman Modal dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang

		2.12.2.12.01.1 5.03	koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah perencanaan pengembangan penanaman modal	paket	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 5.04	peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Bisnis Gatehering yang di lakukan & Fasilitas Rapat - Rapat Koordinasi	kali & kali	1 & 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 5.08	peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Pegawai yang di latih	orang	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 5.09	penyelenggaraan pameran penanaman modal dan investasi	Jumlah Pameran yang di ikuti	kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)	Juta Rupiah	479.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 6.05	pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Jumlah perusahaan / investor yang diadakan pembinaan dan pengawasan	investor & pengawasan	15 & 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 9	Program Pengelolaan Data dan Pengendalian	Sistem Informasi Perijinan Terbangun	Buah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 9.01	pengembangan sistem informasi penanaman modal	Aplikasi sistem informasi pelayanan perijinan	paket aplikasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 9.02	penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	Jumlah cetak biru (master plan)	buku	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.1 9.03	sosialisasi dan peningkatan potensi daerah	- Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang
				- jumlah baliho yang didirikan	bh	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp
		2.12.2.12.01.1 9.04	monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Monev	kali	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp	Kab. Sampang

			penanaman modal dan perijinan	- Jumlah Pelaporan	pelaporan	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p	Kab. Sampang			
		2.12.01.15	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	Investor	-	840	248.539.200	2.523	136.411.280	-	-	-	-	-	-	-	-	2.523	384.950.480	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.15.01	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD	kali	-	4	35.749.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.15.02	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Jumlah Profil / Prospektus Investasi dan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal	Prospektus, peraturan PM dan FGD	-	4	90.000.000	1	61.099.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151.099.300	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	
				Rapat - Rapat Perencanaan Penanaman Modal Daerah dan RKPPMD (FGD)	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.15.03	Promosi Penanaman Modal	- Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang akan diikuti	Matcmaking , kali	-	3	122.790.000	-	75.311.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.101.980	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	
				Macmaking/ ghatering dan Pameran	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
				Laptop dan Printer	Unit	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.16	Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	-	524.274.000	366.913.563	629.178.000	129.881.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629.178.000	496.794.572	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	
		2.12.01.16.01	Penantuan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Penantuan / Pengawasan	Pelaku Usaha	-	40	19.735.500	-	70.955.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.691.284	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	
				- Jumlah Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.16.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	40	92.073.963	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.073.963	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	

				- Jumlah Fasilitas Permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.16.03	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Jumlah Pengembangan Aplikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Paket Aplikasi	-	2	255.104.100	1	58.925.225	-	-	-	-	-	-	-	1	314.029.325	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,01	93,13		93,16									93,16		Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.17	Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Penyelesaian ijin lokasi	buah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				Persentase cakupan perijinan yang dilaksanakan dalam PTSP	%	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18	Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan Investasi	Jumlah Regulasi Perijinan yang ditetapkan	Peraturan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18.01	penataan peraturan daerah tentang perijinan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	kali	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.18.03	pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan Tepat Waktu	%	-	100	233.634.780	100	168.447.350	-	-	-	-	-	-	-	100	402.082.130	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17.01	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor I	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor I	Ijin	-	44	14.551.000	40	81.903.550	-	-	-	-	-	-	-	40	96.454.550	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.12.01.17.02	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 2	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor II	Ijin	-	21	64.150.780	23	23.836.500	-	-	-	-	-	-	-	23	87.987.280	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.17.03	Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 3	Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan di Sektor III	Ijin	-	32	154.933.000	33	62.707.300	-	-	-	-	-	-	-	33	217.640.300	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti	%	-	100	82.140.751	100	32.566.400	-	-	-	-	-	-	-	100	114.707.151	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.01	Fasilitasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah Pengaduan	Pengaduan	-	9	16.898.000	4	21.692.400	-	-	-	-	-	-	-	4	38.590.400	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.02	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Peningkatan SDM	orang	-	70	34.196.751	2	10.874.000	-	-	-	-	-	-	-	2	45.070.751	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.18.03	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah Laporan	laporan	-	12	31.046.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	31.046.000	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
	PENUNJANG (ADUM)										-	-	-	-	-	-	-	-		Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi Perkantoran	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	1.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik, telpon dan faksimile	rek	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	STNK Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Roda 4	unit	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan Pembersih, Peralatan Kebersihan Dan Jasa Cleaning Service	jenis	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang	
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan penggandaan	jenis	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	jenis	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spanduk, umbul-umbul dan bendera	jenis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran surat kabar	exp	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mamin Staf Meeting dan mamin tamu	orang	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BBM dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	liter & Kali	490 & 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tenaga Honor Daerah	orang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	BBM dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	liter & Kali	190 & 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.10	Pengadaan Meubelair	Meja Kerja Dan Kursi Kerja	unit	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.11	Pengadaan Komputer	Flashdish, Mouse, Hardish, Printer dan Laptop	unit	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.12	Pengadaan Peralatan Kantor	Lemari Arsip Pintu 2 sliding , filing kabinet dan fingerprint	unit	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.12.2.12.01.0 1.02.19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	AC, Pompa air dan jenset	unit	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BBM, Pelumas, Service dan suku cadang kendaraan dinas	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.03.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian dinas Harian Pegawai	Orang	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	71,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS Yang ikut Diklat / bintek	Orang	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan laporan kinerja tepat waktu	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.06.01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.06.02	penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Dok	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan akhir tahun	Dok	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.12.2.12.01.0 1.06.05	penyusunan renja, RKA-SKPD dan DPA OPD	Penyusunan Renja, RKA, SKPD da DPA OPD	Dok	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang

		2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	-	100	366.395.418	96,79	310.436.868	-	-	-	-	-	-	-	96,79	676.832.286	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang terkirim	Surat	-	2.200	165.308.445	1.500	221.708.190	-	-	-	-	-	-	-	1.500	387.016.635	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Rekening	-	4		4		-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	Unit	-	11		11		-	-	-	-	-	-	-	11	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah tenaga kebersihan	Ob	-	4		4		-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	-	25		27		-	-	-	-	-	-	-	27	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Ob	-	-		30		-	-	-	-	-	-	-	30	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	Ob	-	1		1		-	-	-	-	-	-	-	1	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah ATK	jenis	-	45	85.726.798	46	42.667.282	-	-	-	-	-	-	-	46	128.394.080	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah barang cetakan	jenis	-	10		10		-	-	-	-	-	-	-	10	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah barang penggandaan	Jenis	-	12		10		-	-	-	-	-	-	-	10	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	-	19		18		-	-	-	-	-	-	-	18	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Cakupan pemenuhan bahan bacaan	Exp	-	24		26		-	-	-	-	-	-	-	26	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Orang	-	55		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.12.01.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah koordinasi dalam daerah	liter & Kali	-	1206 & 40	115.360.175	450 liter & 12 kali	46.061.396	-	-	-	-	-	-	-	450 liter & 12 kali	161.421.571	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah koordinasi luar daerah (kali)	liter & Kali	-	79		18		-	-	-	-	-	-	-	18	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	-	100	1.104.180.025	100	315.739.490	-	-	-	-	-	-	-	100	1.419.919.515	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.02.01	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Unit	-	1	915.446.315	0	222.883.790	-	-	-	-	-	-	-	0	1.138.330.105	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1		1		-	-	-	-	-	-	-	1	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.02.03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah kendaraan Dinas R4 yang diadakan	Unit	-	0	38.402.850	-	29.793.900	-	-	-	-	-	-	-	-	68.196.750	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah Kendaraan dinas R2 yang diadakan	Unit	-	0		-		-	-	-	-	-	-	-	0	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	Unit	-	4		4		-	-	-	-	-	-	-	4	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah pengadaan peralatan kantor	Unit	-	16	150.330.860	4	63.061.800	-	-	-	-	-	-	-	4	213.392.660	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	-	6		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Unit	-	9		6		-	-	-	-	-	-	-	6	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
				- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	Jenis	-	8		32		-	-	-	-	-	-	-	32	0	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	-	100	31.408.624	100	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	100	33.308.624	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang
		2.12.01.03.01	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi /Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ seminar	Orang	-	10	31.408.624	1	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1	33.308.624	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang

		2.12.01.04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Publik	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat waktu	%	-	100	48.076.590	83,33	19.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	67.084.590	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Jumlah Laporan Triwulan, Jumlah Laporan Semesteran, Laporan akhir Tahun, CALK, dan LKJIP	Dokumen	-	5	14.988.975	6	10.011.300	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25.000.275	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	Dokumen	-	5	14.977.865	4	8.996.700	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23.974.565	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		
		2.12.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Publik	- Jumlah Dok. SKM, Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Dokumen	-	2	18.109.750	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.109.750	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																						Dpmptsp Naker	Kab. Sampang	
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI		
							2.019		2.020		2021		2022		2023		2024		KINERJA				Rp.	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja				Tingkat Pengangguran terbuka	%				2,41		3,35		3,08 %	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		
	1. Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%				56,91		75,9		95,26	-	-	-	-	-	-	-	Dpmptsp Naker	Kab. Sampang		

											0		3.016.473.284	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang	
		2.07.03	Pogram Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	%	-	-	-	-	-	79,01	0	68,75	3.016.473.284	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	%	-	-	-	-	-	79,01	0	68,75	3.016.473.284	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	Orang	-	-	-	-	-	0	0	500	3.016.473.284	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Sarana untuk Pelatihan di BLK yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	584.089.608	77,23	161.301.584	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitas	%	-	-	-	-	-	75,9	15.580.000	77,23	37.910.000	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja dan rekrutmen Tenaga Kerja	Orang	-	-	-	-	-	0	4.600.000	0	0	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
				Jumlah Perpindahan Masyarakat ke Daerah Transmigrasi (KK)	KK	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi bursa tenaga kerja	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	10.980.000	5	37.910.000	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.03	Pengolahan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	75,9	47.864.863	77,23	54.422.784	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Job Fair	Kegiatan	-	-	-	-	-	0	47.864.863	1	54.422.784	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang
		2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi	%	-	-	-	-	-	75,9	520.644.745	77,23	68.968.800	-	-	-	-	-	-	Dpmpts p Naker	Kab. Sampang

		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI Bermasalah	orang	-	-	-	-	-	4476	520.644.745	100	68.968.800	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%	-	-	-	-	-	100	32.400.973	100	17.306.067	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%	-	-	-	-	-	100	15.265.700	100	17.306.067	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan	-	-	-	-	-	80	15.265.700	150	17.306.067	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
				Penyusunan UMK	Peraturan	-	-	-	-	-	0				1	-	-	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang
				Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHL dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten kabupaten	Kecamatan	-	-	-	-	-	-				10	14	-	-	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	%	-	-	-	-	-	100	0	0	0	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Kasus	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Dpmppts p Naker	Kab. Sampang			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																								

1. Meningkatnya Investasi Daerah				Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	-	-			0,13		0,16 %		0,24%		0,32%		0,32%		Dpmptsp	Kab. Sampang	
	1. Meningkatnya realisasi Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp	-	-			297.513,257		303.257,158		306.687,934		310.223,389		310.223,389		Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi	Jenis	-	-	-	-	0	13.849.852	2	81.652.790	4	112.103.802	6	211.785.799	6	419.392.243	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi	Jenis	-	-	-	-	0	13.849.852	2	81.652.790	4	112.103.802	6	211.785.799	6	419.392.243	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Prospektus Kabupaten	propektus	-	-	-	-	0	13.849.852	1	81.652.790	-	112.103.802	-	211.785.799	-	419.392.243	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Rapat-rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	Kali	-	-	-	-	0		2		-		-		-		Dpmptsp	Kab. Sampang	
				*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1			Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	-	-	-	-	3563	13.450.251	2700	137.589.771	2800	250.165.519	2900	158.460.729	2900	559.666.270	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	Investor	-	-	-	-	3563	13.450.251	2700	137.589.771	2800	250.165.519	2900	158.460.729	2900	559.666.270	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor / Jumlah Matcmaking	Matcmaking	-	-	-	-	0	13.450.251	1	137.589.771	-	250.165.519	-	158.460.729	-	559.666.270	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	Kali Pameran	-	-	-	-	0		2		-		-		-			Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4		4				Dpmptsp

		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	58	438.270.940	180	412.659.910	185	511.115.565	190	533.584.621	675	1.895.631.036	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	58	438.270.940	180	412.659.910	185	354.700.000	190	533.584.621	675	1.739.215.471	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	pelaku usaha	-	-	-	-	-	55	50.441.640	70	20.303.950	-	0	-	109.706.774	-	180.452.364	Dpmptsp	Kab. Sampang
				* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-		
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	-	-	-	-	-	406	199.146.000	40	313.892.610	-	312.350.000	-	314.138.137	-	1.139.526.747	Dpmptsp	Kab. Sampang
				Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
				* Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan modal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	500	-	500	500	-	Kab. Sampang	
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	pelaku usaha	-	-	-	-	-	30	188.683.300	70	78.463.350	-	42.350.000	-	109.739.710	-	419.236.360	Dpmptsp	Kab. Sampang
				* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	90	-	90	-		

		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Juta Rp	-	-	-	-	-	654.170,714	77.952.409	745.128,403	133.872.580	849.046,211	85.858.199	967.865,730	235.197,243	967.865,730	532.880.431	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	-	-	-	-	-	654.170,714	77.952.409	745.128,403	133.872.580	849.046,211	85.858.199	967.865,730	235.197,243	967.865,730	532.880.431	Dpmptsp	Kab. Sampang	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP)	paket Aplikasi	-	-	-	-	-	0	77.952.409	1	133.872.580	-	85.858.199	2	235.197,243	-	532.880.431	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal	laporan	-	-	-	-	-	-	12		12				12		-			
				* Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang di olah, Dikaji dan Dimanfaatkan.	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1		1	-		
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,01	93,13		93,16		93,26	-	93,35	-	93,50	-	93,75	-	93,75	-		Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	100	113.082,729	100	204.561.685	100	213.474.700	100	213.291,653	100	744.410.767	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%						100		100		100		100		100				
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	%	-	-	-	-	-	100	113.082,729	100	204.561.685	100	213.474.700	100	213.291,653	100	744.410.767	Dpmptsp	Kab. Sampang	

			Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%					100		100		100		100						
				Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen					0		-		2		2				2		
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor I	Izin	-	-	-	-	10	109.820.229	-	162.697.072	-	213.474.700	-	172.419.960	-	658.411.961	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor II	Izin	-	-	-	-	4044		-		-		-						
				Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan di sektor III	Izin	-	-	-	-	1941		-		-		-						
				Jumlah Izin OSS	Izin	-	-	-	-	-		4200		-		2500				2500		
				Jumlah Izin Non OSS	Izin	-	-	-	-	-		2300		-		2600				2600		
				* Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-		-		-		1500			1600	1600	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan	-	-	-	-	0	3.262.500	10	41.864.613	-	0	-	40.871.693	-	85.998.806	Dpmptsp	Kab. Sampang	
				Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan	Kali	-	-	-	-	-		5		-		-				-		
				Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan	Dokumen	-	-	-	-	-		3		-		-				-		

				<i>* Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	<i>Orang</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350				
PENUNJANG (ADUM)																					
		2.18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	-	-	-	-	100	5.047.587.496	100	4.745.245.676	100	4.324.961.057	100	5.691.727.026	100	19.809.521.255	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	%	-	-	-	-	100	24.791.025	100	7.040.646	100	11.000.006	100	24.809.525	100	67.641.202	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)	Dokumen	-	-	-	-	3	2.956.200	3	3.399.186	-	4.244.857	-	2.984.900	-	13.585.143	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3			
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1	2.932.200	1	738.490	-	1.176.485	-	3.019.700	-	7.866.875	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1			
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1	2.977.300	1	687.500	-	1.038.985	-	2.965.900	-	7.669.685	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1			
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1	2.982.800	1	738.490	-	1.356.610	-	3.027.100	-	8.105.000	Dpmptsp	Kab. Sampang

				<i>*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1				
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1	2.967.925	1	738.490	-	1.038.985	-	3.031.350	-	7.776.750	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1				
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (LPPD, LKPI, SPIP, SAKIP, RB)	Dokumen	-	-	-	-	5	9.974.600	5	738.490	-	2.144.084	-	9.780.575	-	22.637.749	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	5		5		5				
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	-	-	-	-	100	3.488.922.408	100	3.666.190.108	100	3.604.351.832	100	4.315.858.280	100	15.075.322.628	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	Orang	-	-	-	-	60	3.465.032.058	50	3.664.592.914	-	3.602.425.712	-	4.307.997.100	-	15.040.047.784	Dpmptsp	Kab. Sampang
				Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan	Ob	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
				<i>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>orang/bulan</i>	-	-	-	-	-	-	-	35		35		35				
		2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	-	-	-	-	46	15.919.000	-	0	-	0	-	0	-	0	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	2.989.900	-	759.589	-	999.140	-	2.971.300	-	7.719.929	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>laporan</i>	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1				

		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	3	4.981.450	3	837.605	-	926.980	-	4.889.880	-	11.635.915	Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan										3		3		3			
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	-	100	2.224.900	100	1.182.903	100	0	100	3.281.145	100	6.688.948	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBM	Dokumen	-	-	-	-	-	1	999.300	1	1.093.757	-	0	-	2.076.100	-	4.169.157	Dpmptsp	Kab. Sampang
				Jumlah Dokumen RKFMBM	Dokumen	-	-	-	-	-	1		1		-		-		-			
				* Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2		2			
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	4	1.225.600	4	89.146	-	0	-	1.205.045	-	2.519.791	Dpmptsp	Kab. Sampang
				* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4		4			
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bintek dan jumlah ASN OPD	Orang	-	-	-	-	-	0	0	6	11.922.000	10	11.922.000	10	58.891.353	10	82.735.353	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ok	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	33.652.400	-	33.652.400	Dpmptsp	Kab. Sampang
				* Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10		10				
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan	Ok	-	-	-	-	-	-	0	6	11.922.000	7	11.922.000	-	11.318.000	-	35.162.000	Dpmptsp	Kab. Sampang

				<i>*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	7			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	177.739.002	100	192.782.207	100	163.649.406	100	323.981.350	100	858.151.965	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	24	90.856.488	15	8.151.038	-	9.997.834	-	71.016.950	-	180.022.310	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2			
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jenis	-	-	-	-	56	13.353.299	56	17.226.612	-	13.784.355	-	14.502.160	56	58.866.426	Dpmptsp	Kab. Sampang
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	-	-	-	-	6	-	8	-	-	-	-	6	-			
				Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera yang diadakan	Jenis	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-			
				<i>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3			
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	-	-	-	-	-	0	50	17.117.107	-	16.999.217	-	19.393.900	-	53.510.224	Dpmptsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1			
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	10	12.076.215	6	15.784.450	-	12.275.000	-	14.805.400	-	54.941.065	Dpmptsp	Kab. Sampang
				Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Jenis	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
				<i>*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1			

		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exp	-	-	-	-	-	48	3.820.000	2	2.760.000	-	2.760.000	-	4.451.850	-	13.791.850	Dpmp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>dokumen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-
		2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OB	-	-	-	-	-	380	7.919.000	200	8.000.000	-	7.840.000	-	7.732.162	-	31.491.162	Dpmp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>laporan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	-	-	-	-	-	50	49.714.000	50	123.743.000	-	99.993.000	-	192.078.928	-	465.528.928	Dpmp	Kab. Sampang
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali	-	-	-	-	-	17	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	kali	-	-	-	-	-	26	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kebutuhan BBM	liter	-	-	-	-	-	600	-	1445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<i>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>laporan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	-	100	501.056.148	100	112.785.057	100	27.000.000	100	145.576.700	100	786.417.905	Dpmp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	-	-	-	-	-	47	99.360.500	63	112.785.057	-	27.000.000	-	145.576.700	40	384.722.257	Dpmp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	5	-	-	-

		2.18.01.2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun/ di rehab	Unit	-	-	-	-	-	1	401.695.64 8	-	0	-	0	-	0	-	401.695.648	Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	100	374.218.39 6	100	480.962.500	100	394.840.875	100	607.682.90 0	100	1.857.704.671	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	-	-	-	-	-	2250	1.505.000	2250	1.650.000	-	2.450.000	-	2.445.500	-	8.050.500	Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-			
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bukan	-	-	-	-	-	12	106.763.39 6	12	158.312.500	-	169.190.875	-	224.486.80 0	-	658.753.571	Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-			
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Ob	-	-	-	-	-	26	265.950.00 0	25	321.000.000	-	223.200.000	-	380.750.60 0	-	1.190.900.600	Dpmptsp	Kab. Sampang
				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-			
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	%	-	-	-	-	-	100	106.771.04 4	100	283.647.012	100	123.627.948	100	189.191.50 0	100	703.237.504	Dpmptsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	6	51.192.044	6	63.063.800	-	52.941.400	-	75.123.300	-	242.320.544	Dpmptsp	Kab. Sampang

				Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit	-	-	-	-	-	13		13		-		-		-			
				<i>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	unit	-	-	-	-	-	-		-	11		19		19				
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	26	15.455.500	62	23.500.000	-	20.000.000	-	18.939.800	-	77.895.300	Dpmpstsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	unit									70		58		58				
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	2	40.123.500	2	197.083.212	-	50.686.548	-	95.128.400	-	383.021.660	Dpmpstsp	Kab. Sampang
				<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	2		3		3				
		2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	100	249.600	100	655.243	100	490.990	100	22.454.273	100	23.850.106	Dpmpstsp	Kab. Sampang
		2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dokumen	-	-	-	-	-	1	249.600	1	655.243	-	490.990	-	22.454.273	-	23.850.106		
				Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali	-	-	-	-	-	0		1		-		-		-			
				<i>*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsure masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel T – C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Mendukung Misi 2

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
IT.4	Indeks Gini	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
IT.5	Indeks Kinerja Agribisnis	74,25	74,52	74,94	75,21	75,68	76,12	76,53	76,53
S.11 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS.14	Persentase kenaikan realisasi investasi	13,80 %	13,85 %	9,96 %	0,08 %	0,16 %	0,24 %	0,32 %	0,32 %

Mendukung Misi 4

No	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.16 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									
IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
IS.25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,01	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,75

Sumber : Dpmpptsp Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.1

Keterhubungan Renstra DPMPSTP NAKER dengan RPJMD Kabupaten Sampang

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DPMPSTP NAKER		SASARAN RENSTRA DPMPSTP NAKER		Kondisi Awal (2018)	REALISASI				TARGET		Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	INDIKATOR	URAIAN		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			13,80 %	9,7 %	-26,69 %	0,13 %	10,71%	0,24 %	0,32 %	0,32 %
				Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi (Juta Rp.)	385.297,435	422.583,748	297.115,146	297.513,257	329.378.337.166	306.687,934	310.223,389	310.223,389
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,40	81,30	81,43	81,80	82,47	82,99	83,51	83,51
				Meningkatnya kualitas pelayan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,01	93,13	93,16	93,26	93,24	93,50	93,75	93,75

Sumber : Dpmpstp Kabupaten Sampang 2021

Tabel 7.2

**KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA PADA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah Peluang Investasi	Penyediaan peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/kota	Jumlah Prospektus Kabupaten	Prospektus
										Rapat- rapat perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD	Kali
										<i>*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota</i>	<i>Dokumen</i>
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Investor	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Minat Investor dan Jumlah Pameran yang di ikuti	Matchmaking
										<i>* Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / kota</i>	<i>Dokumen</i>
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Pengendalain Pelaksanaan Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan	Pelaku Usaha
										<i>* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal
					Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	Kali					

										<i>* Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal</i>	<i>Pelaku Usaha</i>
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Pelaku Usaha
										<i>* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>
					PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Investasi PMDN	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Inforasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP)	Paket Aplikasi
										Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal	Laporan
										<i>* Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang di olah, Dikaji dan Dimanfaatkan.</i>	<i>Dokumen</i>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin OSS	Izin

									Jumlah Izin Non OSS	Izin
									<i>* Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Pelaku Usaha</i>
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan tindak lanjut yang ditangani	Laporan
							Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Perizinan dan Non Perizinan		Kali	
							Jumlah Laporan SP, Maklumat Pelayanan, Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.		Laporan	
							<i>* Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>		<i>Orang</i>	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)	Dok
									<i>*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>dokumen</i>
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dok
									<i>*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dok	

								Perubahan RKA-SKPD	<i>*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>dokumen</i>
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun	Dok
							<i>*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		<i>dokumen</i>	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	Dok
							<i>*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		<i>dokumen</i>	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok
							<i>*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>dokumen</i>	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	Orang
									Jumlah Kontrak Daerah yang dibayarkan	OB
									<i>*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>orang/bulan</i>
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok

								Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>laporan</i>
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok
									<i>*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>laporan</i>
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	Dok
					Jumlah Dokumen RKPBMMD				Dok	
					<i>* Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				<i>Dokumen</i>	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah	Dok	
								<i>* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>laporan</i>	

						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang
					<i>* Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>			orang	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Orang	
							<i>*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	orang	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Jenis	
							<i>*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	paket	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jenis	
							Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	
							Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera yang diadakan	Jenis	
							<i>*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	paket	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	
							<i>*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	paket	

								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis
									Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	jenis
									<i>*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>paket</i>
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar
									<i>*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>dokumen</i>
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Ob
									<i>*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>laporan</i>
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali
									Jumlah kebutuhan BBM	Liter
									<i>*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>laporan</i>
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit
									<i>*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>unit</i>
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun/ di rehab	Unit

								<i>*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	<i>unit</i>
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat					
			<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>laporan</i>					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan					
			<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>laporan</i>					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	OB					
			<i>*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>laporan</i>					
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit					
			Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit					
			<i>*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>unit</i>					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	Unit					
			<i>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>unit</i>					

								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit
									<i>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>unit</i>
						Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok
									Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	Kali
									<i>*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	<i>laporan</i>

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024
PMDN 17/2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	REALISASI KINERJA SEBELUM KINERJA AWAL (PREBASELINE)		2018	REALISASI				TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024		Target Akhir Kinerja RPJMD
			2016	2017		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
II.	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
12	Penanaman Modal											
	<i>Persentase Kenaikan Realisasi Investasi</i>	%			13,8	9,70	(29,69)	0,13	10,71	0,24	0,32	0,32
	<i>Tercapainya Realisasi Penanaman Modal*</i>	juta rupiah	N/A	N/A	N/A	422.583.748	297.115.146	297.513.257 .988	329.378.337. 166	306.687.93 4	310.223.389	310.223.38 9
III	Fokus Iklim Berinvestasi											
	Indeks Toleransi	-	-	-	3,52	3,65	3,67	-	-	-	-	-
	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	154,8	140,68	127,19	-	-	-	-	-
	<i>Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu</i>	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Nilai investasi PMDN</i>	juta rupiah	N/A	N/A	385.297,0 0	542.274,00	629.178,00	343.102.489 .022	1.105.339.43 9.463	849.046,00	967.866,00	967.866,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sampang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang DPMPTSP masih belum optimal, SDM pada DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, DPMPTSP Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” dan “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan oleh DPMPTSP Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam kurun waktu lima tahun.

